

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, Indonesia merupakan bagian dari negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan terus mengupayakan pembangunan, dituntut untuk meningkatkan kondisi perekonomiannya lebih kompetitif. Sebagai upaya dalam menunjang peningkatan kondisi perekonomian, haruslah didukung dengan sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Indonesia dengan segala kekayaan sumber daya alam serta manusianya menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu memajukan pembangunan terutama pada sektor pertanian, dan didukung oleh kekayaan sumber dayanya.

Pertama kalinya pada tahun 1972 Indonesia meletakkan kebijakan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan bangsa. Hal ini mengingat peran strategis sektor pertanian dengan besarnya jumlah penduduk yang terlibat didalamnya. Program BIMAS (Bimbingan Massal) dan KUD muncul pada tahun 1983 memiliki salah satu peranan yang berfungsi untuk melaksanakan penyaluran sarana produksi seperti, bibit, pupuk, obat-obatan, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian serta perkreditan untuk membantu permodalan dalam usaha tani. Kekurangan bahan pokok (beras) terjadi di Indonesia pada tahun 1993,

pada tahun yang sama untuk pertama kalinya impor beras dibuka, mengakibatkan stok beras di pasaran didominasi beras dari luar negeri sebesar 24.317 ton, asal Thailand dan Amerika Serikat. Resesi moneter yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan jatuhnya perekonomian Indonesia dan mendorong terjadinya krisis ekonomi, sosial, dan politik. Krisis ini bukan hanya menjatuhkan perekonomian bangsa yang telah dibangun berpuluh-puluh tahun khususnya pada era rezim Soeharto, tetapi juga telah mengakibatkan runtuhnya tatanan sosial dan tatanan politik hal ini dibuktikan dengan jatuhnya rezim Soeharto akibat krisis moneter pada tahun 1998 (Sukino, 2013: 10–11).

Persaingan sektor pertanian Indonesia pada era globalisasi saat ini menjadi berat khususnya persaingan di dalam negeri sendiri. Ini diakibatkan dengan masuknya hasil-hasil pertanian dari negara lain yang mendominasi di pasar dalam negeri, yang berdampak pada melemahnya daya beli konsumen terhadap barang lokal yang relatif lebih mahal, di banding produk luar dan berimbas pada pendapatan petani yang semakin merosot, akibat dari proses produksi yang terus berlangsung namun tidak diimbangi dengan konsumsi masyarakat akan produk lokal.

Ketidak seimbangan tersebut memicu timbulnya kemiskinan, yang menyebar di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan yang merupakan penghasil bahan pokok di sektor pertanian seperti pada tabel di 1.1:

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Menurut Daerah, Maret-September 2012

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
Maret 2012	10,65	8,78
September 2012	10,51	8,60

Perdesaan Maret 2012	18,48	15,12
September 2012	18,08	14,70
Perkotaan+Perdesaan Maret 2012	29,13	11,96
September 2012	28,59	11,66

(Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2012 dan September 2012)

Dari tabel 1.1 memperlihatkan mengenai tingkat kemiskinan lebih menyebar pada daerah pedesaan yang utamanya adalah sektor pertanian. Mencapai 18.48 juta jiwa warga pedesaan dikategorikan miskin yang rata-rata penduduknya bermata pencarian di bidang sektor pertanian.

Sektor pertanian mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional, antara lain berupa kontribusi dalam pembentukan PDB, penyediaan pangan dan pakan, penyediaan sumber devisa, penyediaan bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, dan sumber bio-energi (Peraturan Kementerian Pertanian, 2013). Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku usaha pertanian. Guna mencapai tujuan tersebut, kegiatan pembangunan pertanian menuntut termanfaatkannya seluruh potensi yang ada di masyarakat, baik potensi sumber daya alam, manusia, teknologi dan juga sumberdaya institusi secara optimal, menguntungkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Permasalahan sektor pertanian dan kemiskinan memiliki kaitan erat, dimana permasalahan sektor pertanian adalah kekurangan dalam permodalan menyebabkan petani mengalami kesulitan mengelola lahannya, sehingga

terjadilah kemiskinan akibat dari ketidakberdayaan petani mengelola lahannya dan berimbas pada ketidakmampuan petani memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi. Apalagi jika melihat data mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia menurut BPS pada tahun 2012 mencapai 28,59 juta maka kemiskinan khususnya di daerah pedesaan menjadi hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pertanian dan perdesaan baik secara langsung maupun tidak langsung tentu saja akan berdampak pada upaya pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan penguraian kemiskinan di daerah pedesaan dengan berangkat dari permasalahan pertanian maka Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Program Revitalisasi Pertanian. Program Revitalisasi Pertanian ini menghasilkan beberapa program utama yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Kesejahteraan Petani serta Pengembangan Sumber Daya dan Pemantapan Pemanfaatannya, baik di bidang perikanan maupun kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Program-program ini kemudian diturunkan menjadi program jangka menengah yang dicanangkan bersama Departemen Pertanian Republik Indonesia (Prihantono, 2009:5) . Salah satu program turunan yang utama adalah program BLM–PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan). BLM–PUAP ini diturunkan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) No.08/permentan/OT.140/1/2013

tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan. BLM–PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) ini merupakan salah satu program pemberdayaan. Artinya kesuksesan program tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar lembaga yang terkait. Program BLM–PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) ini bukan hanya program yang berasal dari pemerintah saja namun terdapat aspek pemberdayaan. Sasaran program ini adalah terbinanya masyarakat desa yang mandiri dengan usaha pertanian. Melalui pemberdayaan masyarakat program BLM–PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan menanggulangi angka kemiskinan daerah pedesaan. Adanya kebijakan pemberdayaan petani dengan peran pemerintah serta kelembagaan dengan lebih memfokuskan bagaimana peran pemerintah dan kerjasama antar kelembagaan dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat petani dapat mensejahterakan kehidupan petani, menyelesaikan permasalahan yang timbul serta mampu meningkatkan pendapatan daerah sektor pertanian guna peningkatan pembangunan di sektor pertanian.

BLM–PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) ini dilaksanakan dengan adanya tim pembina program PUAP yaitu Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi

oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. Gapoktan PUAP ini mempunyai tujuan untuk dapat menjadi kelembagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/permantan/OT.140/1/2013 BLM–PUAP mempunyai empat tujuan yaitu: (1) mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, (2) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis pedesaan, (3) memberdayakan kelembagaan petani dalam mengembangkan usaha agribisnis, dan (4) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani. BLM–PUAP dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan–kegiatan penunjang pertanian. BLM–PUAP juga mempunyai strategi dasar yang meliputi optimalisasi potensi usaha agribisnis desa miskin dan tertinggal, penguatan modal usaha bagi petani kecil dan pelatihan pendampingan Gapoktan.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2012 tentang jumlah penduduk miskin Indonesia, Provinsi Lampung menduduki peringkat 5 (lima) teratas dari 32 provinsi di Indonesia, dengan peringkat tersebut menjadikan Provinsi Lampung sebagai Provinsi penerima program BLM–PUAP yang cukup besar pada daerah sebaran desa miskin. Guna memperlancar dan mempermudah pelaksanaan BLM–PUAP didukung dengan adanya Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/456/III.12/HK/2010 mengenai pembentukan tim pembinaan BLM–PUAP.

BLM–PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) di Provinsi Lampung terbagi dalam 14 kabupaten/kota pada Provinsi Lampung. Dana yang diterima sebesar Rp.100.000.000,- pada setiap desa miskin atau Gapoktan. Salah satu Kabupaten penerima BLM–PUAP terbesar berdasarkan

data evaluasi pelaksanaan 5 tahun PUAP Kabupaten Pesawaran Tahun 2008-2012 adalah Kabupaten Pesawaran didukung dari data BPS tentang kemiskinan tingkat Kabupaten pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa Kabupaten Pesawaran menempati peringkat ke-7 dari 14 Kabupaten/Kota di Lampung. Kekayaan alam Kabupaten Pesawaran pada sektor pertanian juga menjadi faktor utama dana BLM –PUAP banyak digulirkan hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 1.2 :

Tabel 1.2. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Pesawaran

Potensi Lahan	Luas (ha)	Luas (%)
Lahan basah	21.552	18,36
Lahan kering	17.271	81,95
Budidaya laut	4.775	-

(sumber: pesawarankab.go.id diakses pada 04 Desember 2013, 02.00 wib)

Dari tabel 1.2 memperlihatkan bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Pesawaran, terbesar adalah potensi lahan basah seluas 21.552 ha.

Tabel 1.3. Komoditas Utama Sektor Pertanian Kabupaten Pesawaran

Komoditas	Hasil Produksi (ton)	Luas (ha)
Tanaman Pangan:		
Padi	134.707	27.188
Jagung	102.396	19.473
Ubi Kayu	64.459	2.829
Ubi Jalar	2.472	252
Kacang Tanah	454	342
Kacang Kedelai	664	570
Kacang Hijau	289	293
Hortikultura:		
Buah-buahan:		
Mangga	1.251,5	-
Durian	1.687,7	-
Papaya	1.931,8	-
Pisang	168.819,5	-
Rambutan	2.487	-
Sayuran:		
Kacang Panjang	512	-

Cabe	7.874	-
Melinjo	2.222,6	-
Bawang Merah	564	-
Sawi	620	-
Terong	940	-
Buncis	662	-
Petai	663,6	-
Ketimun	445	-

(sumber: pesawarankab.go.id diakses pada 04 Desember 2013, 02.00 wib)

Dari tabel 1.3 memperlihatkan bahwa komoditas utama sektor pertanian Kabupaten Pesawaran adalah komoditas tanaman padi dengan luas lahan 27.188 ha dan hasil produksi mencapai 134.707 ton berdasarkan data pertanian tahun 2009.

Berbeda dengan hasil potensi SDA sektor pertanian yang dimiliki Kabupaten Pesawaran data kemiskinan Kabupaten Pesawaran masih tinggi dengan menduduki 7 (tujuh) teratas dari 14 Kabupaten/Kota mencapai 77.100 ribu jiwa pada tahun 2012 dan lebih dari 50% warga miskin Kabupaten Pesawaran berada di daerah pedesaan dan berrmatapencarian di sektor pertanian. Hal ini menegaskan mengenai kekayaan SDA yang melimpah namun tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan penduduk khususnya petani Kabupaten Pesawaran. Selain itu, Kabupaten Pesawaran juga merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran wilayah. Sebagai DOB, kemiskinan rentan terjadi. Kemudahan akses data juga menjadi pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian. Pemilihan Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan sebagai lokasi penelitian di dasarkan pada fakta bahwa kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan jumlah Gapoktan terbanyak berdasarkan data evaluasi pelaksanaan 5 tahun PUAP Kabupaten Pesawaran Tahun 2008-2012 yang telah memiliki LKM-A, dimana LKM-A merupakan bukti bahwa Gapoktan berjalan

dengan baik, serta salah satu desa dengan Gapoktan yang telah memiliki LKM–A serta penerima BLM–PUAP adalah Desa Taman Sari. Berangkat dari fakta–fakta yang ada dan keingintahuan yang timbul pada diri peneliti untuk mengetahui dengan fakta –fakta yang ada, apakah mampu mensejahterakan petani di desa tersebut. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah tentang:

“Evaluasi Dampak Kebijakan Pemberdayaan Petani Melalui Program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM–PUAP) Di Kabupaten Pesawaran (Studi Kasus di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak dari kebijakan pemberdayaan petani melalui program BLM–PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran ?
2. Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan petani melalui program BLM-PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dampak dari kebijakan pemberdayaan petani melalui program BLM-PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran;
2. Menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan petani melalui program BLM-PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan tentang kajian Ilmu Administrasi Negara dan menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan Pemberdayaan Petani Melalui Program BLM – PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) di Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai rujukan solusi untuk mengetahui dampak dari adanya Kebijakan Pemberdayaan Petani Melalui Program BLM – PUAP (Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan) di Kabupaten Pasawaran mampu meningkatkan perekonomian masyarakat tani di pedesaan.